

RENCANA STRATEGIS



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024 - 2026

RENCANA STRATEGIS - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalui tahapan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan semua bidang-bidang beserta Instansi yang terkait.

Rencana Strategis (RENSTRA) secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik disertai dengan rencana-rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna penyempurnaan penyusunannya.

Besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten dan terpadu serta terarah yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berpolitik yang demokratis, berkeadilan, agamis, berbudi pekerti yang luhur dan perlindungan masyarakat menuju suksesnya Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan agamis.

Kepala Badan Kesbangpol

Agus S. P.
Pembina TK. I
NIP. 19740815200312 1 004



Bab I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.



Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan tiga tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2024-2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 4 Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
10. Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 41 Tahun 2022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Pihak Asing;
15. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang Bantuan Keuangan keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 49 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemantauan orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Kesadaran Bela Negara di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
22. Peraturan Daerah nomor : 15 tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.



Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara (RPJMD) Tahun 2024 – 2026.
2. Untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya.
4. Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat tercapai.
5. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penajam Paser Utara dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dalam mencapai tujuan pembangunan.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
7. Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP



Bab II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

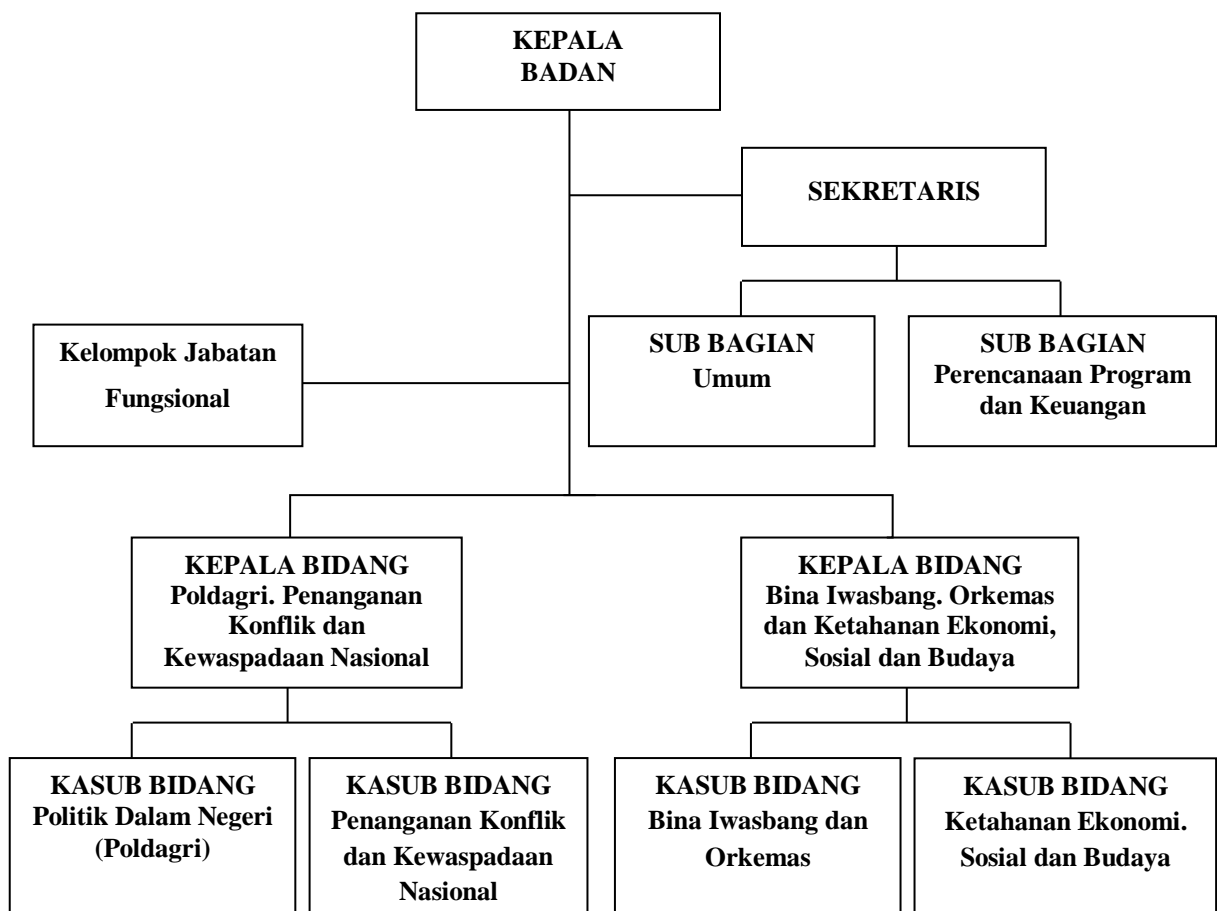
2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 3 tahun 2016, tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) adalah unsur pendukung pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi sampai Satu Eselon di bawah Kepala SKPD

2.1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
 - b. Perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Perumusan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. Pengendalian pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - h. Penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ke absahan naskah dinas;
 - i. Penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Sekretaris dan bawahan lain pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan dan pedoman yang ada;



- k. Pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.2 Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program. pengelolaan administrasi keuangan. administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan usulan Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - b. Penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;



- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Administrasi umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan serta Penyusunan Program;
- g. Pemberian petunjuk, Penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Pelaksanaantugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.3 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;



- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program dan Keuangan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.4 Sub Bagian Umum

- (1) Sub bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;



- f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.5 Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan tugas. permasalahan dan kebijakan yang ada pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan usulan Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta



Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional satu kabupaten;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.6 Sub Bidang Politik Dalam Negeri

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, Melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Etika, Budaya Politik dan Fasilitasi Politik dan Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan DPA;



- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri yang meliputi pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, peningkatan dan pemahaman tentang demokrasi yang berdasarkan Pancasila, peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik, fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik, prosedur penyusunan data dan informasi partai politik, fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri, fasilitasi penanganan masalah dinamika politik, fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Kepala daerah, presiden dan wakil presiden, DPR dan DPRD dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.



2.7 Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas. permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - f. Pembimbingan. pengarahan. dan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan pelaksanaan deteksi dini potensi konflik terhadap perkembangan teknologi informasi strategik dan kebijakan strategik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan atas kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi. Kondisi perbatasan antar Negara, Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen. pengkoordinasian kegiatan intelijen melalui rapat rutin perumusan pengkoordinasian, pengamanan, evaluasi keberadaan dan aktifitas orang asing, penelitian asing, tenaga kerja asing di wilayah, pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,



fasilitas pelaksanaan penanganan konflik sosial dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di wilayah kabupaten penajam paser utara;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang–Bidang Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.8 Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

- (1) Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Bina Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk bahan perumusan DPA;
 - b. Penyusunan rencana program Bina Iwasbang Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan usulan Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah



- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosia, Budaya;
 - d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. Pengendalian pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
 - g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.9 Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas

- (1) Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan



tugas di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
 - f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan ideologi dan wawancara kebangsaan, pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, rasa cinta terhadap bendera, Bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan. pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pembinaan kesadaran akan semangat dan jiwa nasionalisme, pembinaan dan memelihara integrasi bangsa. peningkatan ketahanan dan memelihara keutuhan NKRI. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, peningkatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
 - g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;



- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.10 Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan. melaksanakan. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas. permasalahan .kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas. permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya;
 - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - f. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pemetaan. monitoring di bidang ketahanan ekonomi, social, seni dan budaya. lingkungan hidup dan sumber daya alam, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial



yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan social, pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. fasilitasi dan koordinasi pelestarian Bahasa daerah, lagu bertema kebangsaan cinta tanah air dan nasionalisme, kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan dan penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.1.4 Uraian Struktur Organisasi. Jumlah Personil. Tata laksana SKPD (Proses, Prosedur, Mekanisme)

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5. Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

6. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

7. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

8. Bidang Bina Iwasbang. Orkemas dan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya

Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

9. Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas

Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.

10. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang. Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.

Struktur dan tugas pokok, fungsi rincian tugas struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat defenitif terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 1 (satu) Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan, 1 (satu) Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 (satu) Kabid Politik Dalam Negeri. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, 1 (satu)



Kasubbid Politik Dalam Negeri. 1 (satu) Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, 1 (satu). Kabid Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya. 1 (satu) Kasubbid Bina Iwasbang dan Orkemas dan 1 (satu) Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Kasubbag Umum
3. Kepala Bidang Poldagri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - a. Kasubbid Politik Dalam Negeri
 - b. Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
4. Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
 - a. Kasubbid Bina Iwasbang dan Orkemas
 - b. Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Daftar dan jumlah tenaga di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Per 1 Januari 2023

A. Jumlah Tenaga PNS

No	Tingkat	Jenis/Jurusan	Jumlah (Orang)
1	S2/Sarjana	Magister Teknik	1
		Magister Studi Islam	1
2	S1/Sarjana	Sarjana Pendidikan	1
		Ilmu Administrasi Negara	4
		Ilmu Hukum	3
		Kehutanan	1
		Sarjana Komputer	1
		Sarjana Sastra	1
		Ilmu Pemerintahan	1
		Sarjana Ekonomi	2
2	D3/Sarjana Muda	Akuntansi	1
3	SMA		1
	Jumlah		18



Jumlah Tenaga Non PNS

No	INSTANSI	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
		Paket B	Paket C	SMA/SMK	DIII	S1	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	22	4	5	31

2.2.2. Aset Modal

Aset Modal yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung kinerja Badan dalam proses pelayanan sehari-hari adalah sebagai berikut :

a. Aset Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jenis / Merk / Type	Ukuran/cc	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Station Wagon	Nissan / Grand Livina	1600	Besi	2009	Pembelian	Mutasi dari Setkab
2	Sepeda Motor	HONDA / Matic		Besi	2009	Pembelian	
3	Sepeda Motor	HONDA / Mega Pro		Besi	2009	Pembelian	
4	Station Wagon	Nissan	2000	Besi	2010	Pembelian	
5	Sepeda Motor	HONDA / New Revo		Besi	2010	Pembelian	
6	Sepeda Motor	HONDA / New Beat		Besi	2010	Pembelian	
7	Sepeda Motor	HONDA / Mega Pro		Besi	2010	Pembelian	
8	Sepeda Motor	YAMAHA / Vixion		Besi	2013	Pembelian	
9	Sepeda Motor	YAMAHA / Vixion		Besi	2013	Pembelian	
10	Sepeda Motor	YAMAHA / SOUL GT		Besi	2013	Pembelian	
11	Sepeda Motor	YAMAHA / Soul GT		Besi	2013	Pembelian	
12	Station Wagon	Toyota Kijang Inova		Campuran		Pembelian	Mutasi dari Setkab
13	Station Wagon	Toyota Kijang Inova V		Campuran		Pembelian	Mutasi dari Setkab

b. Aset Tidak Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jenis / Merk / Type	Ukuran/cc	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehan
1	Generator Engineering	Yamaha		Plastik	2016	Pembelian
2	Scanner	Canon		Plastik	2009	Pembelian
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia		Besi dan plastik	2013	Pembelian
4	Mesin Listrik Standar	Brother/GX8250		Besi dan plastik	2013	Pembelian
5	Mesin Absen (Time Recorder)	Dta Script		Besi dan plastik	2016	Pembelian
6	Mesin foto copy	Fuji Xerox			2015	Pembelian
7	Lemari besi	Data Scrp		Besi	2013	Pembelian
8	Falling besi/metal	VIP		Besi	2009	Pembelian
	Falling besi/metal	VIP		Besi	2010	Pembelian
9	Brand kas	Krisbow		Besi	2009	Pembelian
10	Alat Penghacur kertas	Paper Shadder/JP-610C		Plastik	2013	Pembelian
11	Papan Nama Intansi				2015	Pembelian
12	White board				2010	Pembelian
13	Lemari Kayu	Olympic		Kayu	2009	Pembelian
14	Lemari Kayu	Olympic		Kayu	2009	Pembelian
15	Lemari Kayu	Activ		Kayu	2010	Pembelian
16	Lemari Kayu	Activ		Kayu	2010	Pembelian



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

17	Meja Kayu	Prodesign		Kayu	2010	Pembelian
18	Kursi Besi/ Metal	Uchiwa			2012	Pembelian
19	Moublier Lainnya	Data Script			2014	Pembelian
20	Lemari Es	Sharp			2010	Pembelian
21	Ac unit	Panasonic		Besi/Plastik	2010	Pembelian
22	Ac unit	Panasonic		Besi/Plastik	2010	Pembelian
23	Kipas Angin	Miyako		Besi	2013	Pembelian
24	Alat dapur lain-lain			Kaca	2009	Pembelian
25	Televisi	Sony	32 inch	Plastik/besi	2014	Pembelian
26	Televisi	Sony	32 inch	Plastik/besi	2014	Pembelian
27	Unit Power supply	ICA		Besi	2011	Pembelian
28	Unit Power supply	ICA		Besi	2012	Pembelian
29	Unit Power supply	ICA/CV1400		Besi	2015	Pembelian
30	Dispenser	Uchida		Plastik	2010	Pembelian
31	Handy Cam	Yasicha		Besi/plastik	2010	Pembelian
32	Gordyn/kray	Gordyn		Kain	2009	Pembelian
33	PC Unit	Compac/Cq3231L		Besi	2010	Pembelian
34	PC Unit	Acer		Besi	2010	Pembelian
35	PC Unit	Compac/Cq3231L		Besi	2010	Pembelian
36	PC Unit	Lenovo		Besi	2010	Pembelian
37	PC Unit	Lenovo		Besi	2012	Pembelian
38	PC Unit	Acer		Besi/Plastik	2013	Pembelian
39	Laptop	Toshiba		Besi/Plastik	2010	Pembelian
40	Laptop	Toshiba		Besi/Plastik	2010	Pembelian
41	Laptop	ACER		Besi/Plastik	2011	Pembelian
42	Laptop	Asus		Besi/Plastik	2012	Pembelian
43	Laptop	Asus		Besi/Plastik	2012	Pembelian
44	Laptop	Asus		Besi/Plastik	2012	Pembelian
45	Laptop	Asus		Besi/Plastik	2012	Pembelian
46	Laptop	Asus/A46C		Besi/Plastik	2013	Pembelian
47	Laptop	Asus/A46C		Besi/Plastik	2013	Pembelian
48	Laptop	Asus/A46C		Besi/Plastik	2013	Pembelian
49	Laptop	Asus/A46C		Besi/Plastik	2013	Pembelian
50	Laptop	Asus/A46C		Besi/Plastik	2013	Pembelian
40	Laptop	Toshiba/C55-C5240		Besi/Plastik	2015	Pembelian
41	Printer	HP/P1005		Besi/plastik	2010	Pembelian
42	Printer	HP/P1005		Besi/plastik	2010	Pembelian
43	Printer	HP/P1102		Besi/plastik	2012	Pembelian
44	Printer	EPSON/L-210		Besi/plastik	2013	Pembelian
42	Printer	EPSON/L-220		Besi/plastik	2015	Pembelian
43	Peralatan Jaringan lain-lain	SIPKD		Plastik	2011	Pembelian
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Activ		Kayu	2012	Pembelian
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Grand		Kayu	2013	Pembelian
46	Meja Tamu Ruangn Biasa	Kenzo		Kayu & kulit	2013	Pembelian
47	Meja Tamu Ruangn Biasa	Morres		Kayu & kulit	2013	Hibah
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kali Style		Plastik/besi	2010	Pembelian
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Gresco		Plastik/besi	2013	Pembelian
50	Camera + Attachment	Canon		Plastik/besi	2014	Pembelian
51	Proyektor + Attachment	Sony		Plastik/besi	2013	Pembelian
52	Camera Digital	Sony		Plastik/besi	2010	Pembelian
53	Facsimile	Panasinic/kx-Mb772		Plastik/besi	2010	Pembelian

2.2.3. Unit usaha yang masih beroperasi

Dalam menjalankan kegiatan harus di dukung dengan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menerima atau merasakan pelayanan yang di berikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Unit kendaraan Kantor yang masih beroperasi yaitu :

1. Mobil Kantor sebanyak 4 Unit
2. Kendaraan Roda 2 sebanyak 9 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan administrasi kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bidang Politik Dalam Negeri, bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, bidang Iwasbang dan Orkemas, bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya serta tugas-tugas tata usaha;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2020**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		NSPK	IKK	Lainnya	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				80%	83%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100	96	-	-	-
2	Ormas yang terverifikasi				78 Ormas	100 Ormas	-	-	-	8 Ormas	61 Ormas	-	-	-	10	61	-	-	-
3	Jumlah masyarakat tersosialisasi wawasan kebangsaan				100 Orang	600 Orang	-	-	-	50 Ormas	175 Orang	-	-	-	50	29	-	-	-
4	Meningkatnya Forum-forum Kebangsaan				8 Forum	9 Forum	-	-	-	4 Ormas	9 Forum	-	-	-	50	100	-	-	-
5	Data Ketahanan Ekososbud & SDA				12 Lap	12 Lap	-	-	-	12 Lap	6 Lap	-	-	-	100	50	-	-	-
6	% Penurunan jumlah kasus Pekat				47%	85%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0	0	-	-	-
7	Menurunnya Konflik (% Konflik yang terselesaikan)				53%	57%	-	-	-	53%	24%	-	-	-	100	42	-	-	-
8	Data IPOLEKSOSBUDHANKAM				12 Lap	12 Lap	-	-	-	12 Lap	12 Lap	-	-	-	100	100	-	-	-
9	% Jumlah Hak Pilih				72%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100	-	-	-	-
10	Terfasilitasinya Administrasi partai politik				10 Parpol	10 Parpol	-	-	-	10 Parpol	9 Parpol	-	-	-	100	90	-	-	-



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Koordinasi Ideologi wawasan Kebangsaan				-	-	300 Orang	300 Orang	-	-	-	30 Orang	850 Orang	-	-	-	10	81	-
2	Terverifikasinya Ormas				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100	100	-
3	Tersedianya Laporan Kondisi Ekonomi di Daerah				-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	100	100	-
4	Terverifikasinya Administrasi Partai Politik di Kabupaten PPU				-	-	9 Parpol	9 Parpol	-	-	-	9 Parpol	9 Parpol	-	-	-	100	100	-
5	Tersedianya Data Konflik dan Penanganannya				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100	100	-



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara Tahun 2019 -2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	793.153.400	877.155.310	-	-	-	725.343.370	839.719.085	-	-	-	91,45	95,51	-	-	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	455.070.000	436.100.000	-	-	-	417.759.000	434.194.000	-	-	-	91,80	94,23	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik	48.519.220	40.800.000	-	-	-	35.705.812	23.948.687	-	-	-	73,59	90,55	-	-	-		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	79.341.560	78.980.000	-	-	-	78.180.000	76.056.000	-	-	-	98,54	99,92	-	-	-		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.561.560	36.200.000	-	-	-	34.813.422	35.933.116	-	-	-	97,90	95,51	-	-	-		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.160.000	15.230.310	-	-	-	14.792.200	15.218.050	-	-	-	97,57	94,23	-	-	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	1.200.000	-	-	-	1.341.000	699.000	-	-	-	22,35	90,55	-	-	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.000.000	-	-	-	798.652	1.395.000	-	-	-	15,97	99,92	-	-	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	-	-	-	1.920.000	2.020.000	-	-	-	80,00	95,51	-	-	-		
Penyediaan Makanan dan Minuman	13.000.000	7.125.000	-	-	-	8.428.224	5.541.732	-	-	-	64,83	94,23	-	-	-		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	58.701.060	64.920.000	-	-	-	58.671.060	64.733.500	-	-	-	99,95	90,55	-	-	-		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.000.000	6.800.000	-	-	-	8.534.000	4.580.000	-	-	-	94,82	99,92	-	-	-		
Penyediaan jasa Keamanan. Sopir. PRT. PMK dan Satpol PP	65.400.000	65.400.000	-	-	-	64.400.000	65.400.000	-	-	-	98,47	95,51	-	-	-		
Penyediaan jasa sewa gedung kantor/ rumah dinas/tempat pertemuan	-	120.000.000	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-	94,23	-	-	-		



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.200.000	76.080.870				105.379.648	69.720.266	-	-	-	86,24	92					
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.400.000	51.480.870	-	-	-	46.345.000	46.635.266	-	-	-	95,75	91					
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	12.000.000	-	-	-	-	11.749.000		-	-	-	97,91	91					
Belanja Perlengkapan Peralatan Kantor	51.800.000	16.600.000	-	-	-	42.940.648	7.975.000	-	-	-	82,90	-					
Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan	10.000.000	8.000.000	-	-	-	4.345.000	15.110.000	-	-	-	43,45	100					
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	18.645.000	83.700.000	-	-	-	15.608.300	82.834.800	-	-	-	83,71	99					
<i>Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan organisasi Kemasyarakatan</i>	7.825.000	82.050.000	-	-	-	7.257.600	81.579.800	-	-	-	92,75	99					
<i>Pendampingan FKUB. Fasilitas FKUB dan Penyuluhan Agama</i>	5.632.500	1.650.000	-	-	-	4.317.900	1.255.000	-	-	-	76,66	76					
<i>Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas</i>	5.187.500	-	-	-	-	4.032.800	-	-	-	-	77,74	-					
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	110.100.000	122.128.290	-	-	-	103.776.560	116.893.290	-	-	-	94,26	96					
Forum Komunitas Intelegen Daerah	84.990.000	-	-	-	-	81.300.160	-	-	-	-	95,66	-					
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	10.010.000	3.180.000	-	-	-	9.480.000	1.260.000	-	-	-	94,71	40					
Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	15.100.000	14.908.290	-	-	-	12.996.400	13.158.290	-	-	-	86,07	88					
Tim Kewaspadaan Dini Daerah	-	104.040.000	-	-	-		102.475.000	-	-	-	-	98					
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	10.000.000	1.300.000	-	-	-	9.739.200	-	-	-	-	97,39	95					



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN/UU No. 35 Than 2009)	10.000.000	-	-	-	-	9.739.200	-	-	-	-	97,39	-	-	-	-		
Sosialisasi Penyakit Masyarakat (pekat)	-	1.300.000	-	-	-	-	1.241.200	-	-	-	-	95	-	-	-		
Program pengembangan wawasan kebangsaan	20.000.000	54.145.000				19.565.000	22.180.393				97,83						
Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	7.500.000	-	-	-	-	7.300.000	-	-	-	-	97,33	-	-	-	-		
Forum Pembauran Kebangsaan	7.500.000	3.295.000	-	-	-	7.390.000	-	-	-	-	98,53	-	-	-	-		
Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 Th 2011)	5.000.000	10.000.000	-	-	-	4.875.000	3.285.000	-	-	-	97,50	-	-	-	-		
Pendidikan pelatihan Bela Negara Berbasis Masyarakat	-	2.850.000	-	-	-	-	9.746.993	-	-	-	97,83	51	-	-	-		
Peringatan Hut Bela negara	-	38.000.000	-	-	-	-	1.450.000	-	-	-	97,33	-	-	-	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	65.600.000				-	46.133.000				-	70					
Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	-	65.600.000	-	-	-	-	46.133.000	-	-	-	-	70	-	-	-		
Program Pendidikan Politik Masyarakat	832.925.000	243.561.600				772.645.693	199.893.200				92,76	82					
Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Umum	625.025.000	-	-	-	-	585.658.268	-	-	-	-	93,70	-	-	-	-		
Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang yang mendapat kursi di DPRD	36.150.000	-	-	-	-	36.150.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th 2011)	21.575.000	-	-	-	-	19.768.500	-	-	-	-	91,63	-	-	-	-		



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Desk Pemilihan Umum	150.175.000	-	-	-	-	131.068.925	-	-	-	-	87,28	-	-	-	-		
Verifikasi administrasi bantuan parpol yang mendapat Kursi di DPRD	-	29.249.100	-	-	-	-	29.049.100	-	-	-	-	99	-	-	-		
Pemantauan, pelaporan dan Evaluasi perkembangan politik di daerah (Permendagri No.61 th 2011)	-	14.312.500	-	-	-	-	13.564.700	-	-	-	-	95	-	-	-		
Pelatihan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	-	200.000.000	-	-	-	-	157.279.400	-	-	-	-	79	-	-	-		
Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi	17.603.300	26.678.766	-	-	-	16.813.300	25.323.500	-	-	-	95,51	95	-	-	-		
<i>Pemantauan dampak kebijakan perekonomian</i>	6.938.300	24.208.766	-	-	-	6.538.300	23.808.500	-	-	-	94,23	98	-	-	-		
<i>Fasilitas Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)</i>	4.075.000	-	-	-	-	3.690.000	-	-	-	-	90,55	0	-	-	-		
<i>Pemantauan/Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)</i>	6.590.000	2.470.000	-	-	-	6.585.000	1.515.000	-	-	-	99,92	61	-	-	-		



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara Tahun 2021 -2022

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.689.260.656	3.642.869.394	-	-	-	3.474.756.538	3.420.824.165	-	-	-	74,10	93,90	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.035.278.629	2.363.297.274				1.437.140.540	2.163.038.499				70,61	91,53			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	1.909.803.629	2.316.887.274	-	-	-	1.350.600.540	2.116.628.499	-	-	-	70,72	91,36	-		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	125.475.000	46.410.000	-	-	-	86.540.000	46.410.000	-	-	-	68,97	100,00	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	61.873.526	81.912.590				52.585.000	79.193.440				84,99	96,68			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	2.241.544	2.361.800	-	-	-	665.000	2.028.000	-	-	-	29,67	85,87	-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	59.631.982	3.880.000	-	-	-	51.920.000	2.029.000	-	-	-	87,07	52,29	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	1.189.700	1.070.400	-	-	-	496.000	577.500	-	-	-	41,69	53,95	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	2.760.000	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	69,57	-	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	134.434.000	74.600.390	-	-	-	38.656.400	74.558.940	-	-	-	28,75	99,94	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	966.634.250	1.140.812.030	-	-	-	796.783.286	1.122.011.273	-	-	-	82,43	98,35	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	935.200.000	3.500.000	-	-	-	780.060.000	1.900.000	-	-	-	83,41	54,29	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	31.434.250	38.423.500	-	-	-	16.723.286	21.622.953	-	-	-	53,20	56,28	-		



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota Penajam Paser Utara Tahun 2021 -2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	286.535.255	1.098.888.530	-	-	-	218.242.934	1.098.488.320	-	-	-	76,17	99,96	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.023.760	56.847.500	-	-	-	39.696.546	56.580.953	-	-	-	49,61	99,53	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	75.100.000	42.847.500	-	-	-	38.896.546	42.758.663	-	-	-	51,79	99,79	-		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	4.923.760	4.000.000	-	-	-	800.000	3.900.000	-	-	-	16,25	97,50	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	12.000.000	10.000.000	-	-	-	171.000	9.922.290	-	-	-	1,43	99,22	-		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	43.926.000	41.254.850	-	-	-	18.269.800	40.345.600	-	-	-	41,59	97,80	-		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	43.926.000	41.254.850	-	-	-	18.269.800	40.345.600	-	-	-	41,59	97,80	-		
Penyusun Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,30	-		



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

(1)	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	(6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	(11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	(16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	15.104.000	28.875.250	-	-	-	0	28.672.000	-	-	-	0	99,30	-		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	28.822.000	12.379.600	-	-	-	-	11.673.600	-	-	-	-	94,30			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	18.269.800	-	-	-	-	63,39	-			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	1.008.659.476	1.064.121.476	-	-	-	819.514.676	1.049.142.424	-	-	-	81,25	98,59			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-		1.064.121.476	-	-	-		1.049.142.424	-	-	-	81,25	98,59			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	771.813.476	771.813.476	-	-	-	771.813.476	771.813.476	-	-	-	100,00	100,00			
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	-	188.278.000	268.590.000	-	-	-	21.120.000	253.632.948	-	-	-	11,22	94,43			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100,00	-			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	54.059.544	34.040.100	-	-	-	36.907.100	30.134.259	-	-	-	68,27	88,53			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	43.745.500	25.833.040	-	-	-	24.988.500	25.708.400	-	-	-		99,52			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	43.745.500	25.833.040	-	-	-	24.988.500	25.708.400	-	-	-		99,52			
Penyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	14.605.500	4.703.600	-	-	-	8.163.500	4.703.600	-	-	-	55,89	100,00			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	11.008.000	4.030.001	-	-	-	-	4.030.000	-	-	-	-	100,00			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	18.132.000	17.099.439	-	-	-	16.825.000	16.974.800	-	-	-	92,79	99,27			
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	266.593.000	122.294.600	-	-	-	77.140.800	32.274.600	-	-	-	28,94	26,39			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	266.593.000	122.294.600	-	-	-	77.140.800	32.274.600	-	-	-	28,94	26,39			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	231.610.000	107.804.600	-	-	-	48.755.000	17.804.600	-	-	-	21,05	16,52			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	15.000.000	-	-	-	-	12.822.200	-	-	-	-	85,48	-			



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	9.988.000	6.770.000	-	-	-	8.418.600	6.770.000	-	-	-	84,29	100,00			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	9.995.000	7.720.000	-	-	-	7.145.000	7.700.000	-	-	-	71,49	99,74			



2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG's yang Pro Poor. Pro Job. Pro Growth serta Pro Environment maka Badan Kesbangpol ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal Kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Strategi dirancang melalui analisa lingkungan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- Kerja Sama
- Keberhasilan
- Kepastian Masa Depan

Analisa Lingkungan Internal terdiri atas Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness). Sedangkan analisa Lingkungan Eksternal terdiri dari Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats)

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

a.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 42 orang yang terdiri dari 12 orang tenaga Aparatur Sipil Negara dan 30 orang yang terdiri Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL). Dari latar belakang S2 1 orang, S1 10 orang, D3 1 orang dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) terdiri dari latar belakang S1 5 orang, D3 4 orang dan SMA 21 orang. Sedangkan ASN berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV 4 orang, golongan III 8 orang sumber data terbaru diambil dari bagian Umum dan Kepegawaian

a.2. Dukungan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :



- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan peta jabatan serta rincian tugas perangkat daerah.

a.3. Tersedianya data peta rawan politik dan konflik berdasarkan data pelaksanaan pengawasan AGHT

Dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memetakan potensi- potensi konflik didaerah, dibutuhkan data-data pendukung sebagai penguat dasar dalam melakukan kegiatan mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di bidang Ipoleksosbudhankam.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Belum tersedianya Gedung Kantor
2. Kualitas Personil dan SDM yang tersedia belum memenuhi standart kompetensi yang di persyaratkan
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana
4. Data dan Informasi belum tersedia secara komprehensif

2.4.2. Analisis Lingkungan Ekstenal

a. Peluang (Opportunities)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat terhadap layanan public untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
2. Masyarakat ingin Suasana Politik dapat berjalan dengan tertib
3. Dukungan dari lembaga - lembaga terkait guna menciptakan suasana yang kondusif, aman dan tentram. Hal ini di buktikan dengan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kodim dan Pemerintah



b. Ancaman (Threats)

Ancaman yang dapat teridentifikasi adalah :

1. Belum Optimalnya Orkemas guna meningkatkan peran serta sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Berkembangnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA
4. Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk
Membangun etika moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu
7. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun.
8. Kehidupan Politik yang belum sepenuhnya demokratis, serta masih terdapat kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik sebagai akibat dari kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
9. Terjadinya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat kurang terserapnya pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat, hal ini jika tidak di Manajemen secara baik bisa berakibat mengganggu iklim investasi di Penajam Paser Utara.

2.4.3. Dari Analisa SWOT tersebut diatas, maka dapat ditentukan faktor – faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut:

- a. Strategi SO (Memaksimalkan Kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang)
 1. Meningkatkan sarana dan prasana untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan



2. Memaksimalkan fungsi – fungsi di setiap bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Mengotimalkan Program dan Kegiatan
- b. Strategi ST (Memaksimalkan Kekuatan untuk mengurangi ancaman)
 1. Memaksimalkan Sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan
 2. Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, memotifasi dan memfasilitasi
 3. Menyusun strategi untuk kesinambungan program.
 4. Mengirim anggota Kominda ke setiap wilayah Penajam Paser Utara untuk menganalisa keadaan.
- c. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
 1. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional. kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
 2. Pemutakhiran informasi data potensi yang ada secara komprehensif
 3. Menyusun strategi untuk kesinambungan program
 4. Memaksimalkan program yang tersedia guna meningkatkan pelayanan.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
 1. Mengembangkan pemutakhiran data sebagai bahan informasi
 2. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan.
 3. Mengembangkan pengetahuan / SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Internal Eksternal	S (STRENGTHS) - Sumber Daya Manusia. - Dukungan Finansial - Perundang Undangan	W (WEAKNEESES) - Kualitas Personil dan SDM yang tersedia belum memenuhi standart kompetensi yang di persyaratkan. - Data dan Informasi belum tersedia secara komprehensif. - Belum tersedianya Gedung Kantor - Kurangnya Sarana dan Prasarana
O (OPPORTUNITY) - Tuntutan masyarakat layanan public untuk Meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan - Masyarakat ingin Suasana Politik dapat berjalan dengan tertib - Dukungan dari lembaga lembaga terkait guna menciptakan suasana yang kondusif. aman dan tentram.Hal ini di buktikan dengankerja sama dengan instansi terkait. Seperti Kejaksaan. Kepolisian. Kodim dan Pemerintah	- Manfaatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Kantor - Manfaatkan keinginan masyarakat untuk menciptakan suasana politik yang tertib - Manfaatkan dukungan dari Lembaga – Lembaga terkait	- Manfaatkan motivasi dan etos kerja masih rendah untuk mendukung tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik - Manfaatkan keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas - Manfaatkan terbatasnya porsi anggaran dibandingkan dengan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah - Manfaatkan Program Pendidikan Politik kepada Partai Politik dan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat - Manfaatkan Program Mewujudkan Ketentraman. ketertiban dan Perlindungan masyarakat secara optimal



<p>T (THREATS)</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum Optimalnya Orkemas guna meningkatkan peran serta sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah- Dalam menjalankan syariat ataupun ajaran dalam beragama sering ditemukan dalam aplikasinya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku- Berkembangnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada. sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA-Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi-Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu-Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun	<ul style="list-style-type: none">- Tingkatkan peran serta Orkemas guna meningkatkan pembangunan di daerah- Tingkatkan peran FKUB dalam menciptakan keharmonisan dalam kerukunan beragama- Meningkatkan Program Pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam berdemokrasi- Tingkatkan peran KOMINDA dalam meningkatkan kemandirian dan kenyamanan	<ul style="list-style-type: none">- Manfaatkan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan dan Kemitraan guna meningkatkan Peran serta Orkemas.- Manfaatkan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan dan Kemitraan guna meningkatkan kerukunan beragama- Manfaatkan Program Pendidikan Politik Partai Politik dan Program Pendidikan Kepada Masyarakat guna mencapai angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu
--	--	---



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis, Peralatan dan Operasional perlu ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kualitas aparatur, Sarana dan Prasarana, Operasional Kantor Serta Peran aktif masyarakat sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- Belum tersedianya gedung kantor
- Kurangnya Sarana dan Prasarana
- Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Belum Optimalnya pembinaan terhadap Orkemas guna meningkatkan peran serta sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
- Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA
- Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu
- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun



- Maraknya Penyakit Masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup daerah, regional, nasional dan internasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok perencanaan dan pengendalian yang merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM dalam mendukung pelayanan perkantoran
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan daerah dalam menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara
3. Belum optimalnya Orkemas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah pasca penetapan IKN
4. Meningkatnya potensi kerawanan konflik Ipoleksosbudhankam pasca ditetapkannya IKN
5. Rendahnya kinerja sebagai pengumpulan data Ekososbud sebagai bahan pertimbangan kebijakan
6. Rendahnya kualitas pendidikan Politik masyarakat dimasa pandemi covid 19
7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam bela negara dan cinta tanah air

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, serta menciptakan suasana yang kondusif pada masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dan memantapkan kelembagaan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa setiap daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 wajib untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini sebagai respon dari akan dilaksanakannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dimana dokumen RPD akan menjadi instrumen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah selama masa transisi Pemilihan Kepala Daerah.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib untuk menyusun RPD Tahun 2024 – 2026. Dalam hal penyusunannya, dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berpedoman pada visi dan misi dikarenakan berada pada masa transisi pemilihan Kepala Daerah, namun tetap memperhatikan tujuan pembangunan pada RPJMN, RPJPD dan RPD Provinsi Kalimantan Timur, serta RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain memperhatikan hirarki dokumen perencanaan nasional dan regional, penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun tahun 2024 - 2026 berdasarkan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien**
- 2. Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan**

Penetapan sasaran strategi diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tiap-tiap tahun untuk kurun waktu tiga tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).



Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul**
2. **Mengembangkan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan**

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				I	II	III	IV	V
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	<i>Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien</i>	C	B	B		
2	Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan	Mengembangkan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan	<i>Meningkatkatn ya pemahaman dan pengetahuan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan</i>	+/- 33%	+/- 45%	+/- 55%		



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dimaksud adalah :

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi menjadi faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2. Pembangunan karakter bangsa yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara.
3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain: harus mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar ataupun daerah lainnya.
4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga / instansi pemerintah, Kabupaten /Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah.
5. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi.
6. Meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan.



7. Memberikan penghargaan bagi lembaga / instansi / masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pencegahan serta memberikan sanksi bagi lembaga /instansi yang tidak mendukung kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
8. Melakukan pendataan, pemantauan lapangan dan verifikasi data orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Jawa Timur
9. Melakukan pendataan, pemetaan dan pelibatan elemen pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkembangan dan aksi radikalisme / terorisme.
10. Memberikan sosialisasi kepada ormas terkait aturan - aturan mengenai penataan dan pemberdayaan ormas.
11. Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan infrastruktur Politik.
12. Penguatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Jatim.
13. Peningkatan SDM bagi seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait dalam pemahaman Budaya Politik, Etika Politik dan Hak Asasi Manusia.
14. Pemberdayaan masyarakat dalam keikutsertaan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.

5.2. Kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.
2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.
3. Membentuk SDM bangsa yang mampu mengaktualisasikan bentuk – bentuk kongkrit bela negara sesuai dengan tantangan zaman.
4. Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan sampai ditingkat desa atau kelurahan.
5. Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Teknologi Informasi serta penguatan Jaringan Intelijen.
6. Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota.



7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan.
8. Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
9. Terdatanya dan telaporkannya keberadaan orang asing yang menyalahgunaan ketentuan perundang undangan melalui optimalisasi Tim Pemantauan Orang Asing.
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
11. Meningkatkan pemahaman budaya bangsa dan nilai Pancasila dalam kehidupan bagi Generasi Muda
12. Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56 / 2017.
13. Melakukan Sosialisasi pendaftaran ormas berdasarkan permendagri 57/2017.
14. Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik.
15. Menyadarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pemilu Luberjurdil
16. Penguatan kelembagaan dan implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik melalui pemberdayaan masyarakat.
17. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam Peningkatan pemahaman budaya, etika politik





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 terdapat 6 (enam) Program, sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- *Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Penyusun Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Pembentukan Paskibraka

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah



- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Penyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



- Penyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan tugas Paskibraka



Indikator kinerja Program (outcome) dan kegiatan output merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 6 (enam) program.

Indikator kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- Nilai AKIP : A
- Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)
- Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)
- Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)
- Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)
- Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)

Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 3 (tiga) tahun ke depan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Organisasi Kemasyarakatan, Tim Kewaspadaan Dalam Daerah, Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sentra Perekonomian di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pengurus dan Anggota Partai Politik serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara

Pendanaan Indikatif kegiatan output merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 6 (enam) program. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagai berikut :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten PPU.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				I	II	III	IV	V
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien	C	B	B		
2	Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan	Mengembangkan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	+/- 33%	+/- 45%	+/- 55%		



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Program Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		Tahun 0	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Nilai AKIP: A	C	C	B	B	-	-	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	Presentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	%	70%	75%	80%	-	-	
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	%	70%	75%	80%	-	-	
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	%	70%	75%	80%	-	-	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	70%	75%	80%	-	-	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	70%	75%	80%	-	-	

Rumusan :

1. Nilai AKIP: A
Adalah Persentase penilaian AKIP dari Pemerintah
2. Presentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)
Adalah: Rata-rata persentase Kegiatan yang dilaksanakan di tahun berjalan
3. Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)
Adalah Rata-rata persentase Kegiatan yang dilaksanakan di tahun berjalan



4. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%) Adalah Rata-rata persentase Kegiatan *yang dilaksanakan* di tahun berjalan
5. Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) Adalah Rata-rata persentase Kegiatan *yang dilaksanakan* di tahun berjalan
6. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%) Adalah Rata-rata persentase Kegiatan *yang dilaksanakan* di tahun berjalan



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara yang diselaraskan dengan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa Politik propinsi Kalimantan Timur. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan menfokuskan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menghadapi tantangan kedepan di dalam pembangunan.

Secara umum dokumen Rencana Strategis ini adalah sebuah garis kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan pelayanan kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara teknis Renstra ini dijabarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang kesehatan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya pada tahun 2024-2026 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD tahun 2024–2026 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.



Demikian Rencana dan Strategi (RENSTRA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 – 2026 disusun sebagai tindak lanjut kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 dan disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya.

Penajam, Juli 2023
Kepala Badan

Agus, S. Pd
NIP. 19710815 200312 1 004



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)
Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP: A
			a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			b Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Arsip dan Penggandaan Dokumen
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
			c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening Listrik Air dan Telepon
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor
			d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Kondisi Aset

			<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</p>	<p>Kendaraan Dinas/Operasional</p>
			<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Kantor</p>
<p>Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing</p>	<p>Meningkatkan Kualitas hidup dan daya saing SDM</p>	<p>Penguatan nilai-nilai kebhinekaan, iklim demokrasi, ketahanan sosial ekonomi dan kerukunan masyarakat</p>	<p>2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)</p>
			<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi pedoman peningkatan bela negara</p>
			<p>Penyusun Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan</p>
			<p>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</p>
			<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,</p>
			<p>Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</p>
			<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</p>
<p>Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing</p>	<p>Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan</p>	<p>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)</p>

Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing	Pemerataan Kesejahteraan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Termonitoring Ormas di Kabupaten PPU
			<i>Penyusun Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</i>
			<i>Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</i>	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</i>
			<i>Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</i>
			Terlaksananya koordinasi	<i>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</i>
Meningkatkan Kualitas hidup dan daya saing SDM	Penguatan nilai-nilai kebhinekaan, iklim demokrasi, ketahanan sosial ekonomi dan kerukunan masyarakat	4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan konflik
			<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta</i>

<p><i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i></p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang</p>
<p><i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i></p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi</p>
<p><i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i></p>	<p>Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang</p>
<p>5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan</p>
<p><i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i></p>	<p>Terpantaunya Kondisi Ekososbud di Kab. PPU</p>
<p><i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i></p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat</p>
<p><i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i></p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah</p>

	<p><i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i></p>	<p>Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah</p>
6.	<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>	<p>Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)</p>
	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika</p>	<p>Tertib Administrasi Keuangan Partai</p>
	<p><i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i></p>	<p>Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan</p> <p>Jumlah Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik</p> <p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum</p>

			<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Jumlah laporan hasil monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
Total				

kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4 thn

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Per
	2024		2025		2026		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	A	4,448,897,635	A	5,291,868,541	A	5,605,195,395	A
48 Laporan	12	2,909,238,134	12	3,348,868,541	12	3,662,195,395	36
56 Bulan	18/14	2,619,478,134	18/14	3,133,268,541	18/14	3,446,595,395	54/42
48 Dok	12	239,760,000	12	165,600,000	12	165,600,000	36
0		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
12 Bulan	12	278,790,000	12	590,000,000	12	590,000,000	36
20 Paket	12	10,540,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36
16 Jenis	8	54,500,000	8	400,000,000	8	400,000,000	24
16 Paket	4	3,750,000	4	15,000,000	4	15,000,000	12
52 Lap	13	210,000,000	13	160,000,000	13	160,000,000	39
12 Bulan	12	1,158,125,501	12	1,253,000,000	12	1,253,000,000	36
48 Lap	12	85,000,001	12	8,000,000	12	8,000,000	36
36 Laporan	12	41,575,500	12	45,000,000	12	45,000,000	36
36 Laporan	12	1,031,550,000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	36
12 Bulan	12	102,744,000	12	100,000,000	12	100,000,000	36

52 Unit	13	82,244,000	13	75,000,000	13	75,000,000	39
30 Unit	10	5,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	30
4 Unit	1	15,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3
70%	70%	1,697,112,517	75%	5,000,000,000	80%	6,300,000,000	80
9 Keg	3	1,697,112,517	3	5,000,000,000	3	6,300,000,000	9
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1500 Org	300	1,500,000,000	300	2,500,000,000.00	300	3,300,000,000	900
40 Org	10	125,786,767	10	1,250,000,000.00	10	1,500,000,000	30
12 Lap	12	71,325,750	12	1,250,000,000.00	12	1,500,000,000	36
70%	70%	239,575,750	75%	2,750,000,000	80%	4,050,000,000	80

120 Lap	12	239,575,750	12	2,750,000,000	12	4,050,000,000	36
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
200 Org	50	110,000,000	50	1,000,000,000.00	50	1,550,000,000	150
40 Org	10	58,250,000	10	1,000,000,000.00	10	1,500,000,000	30
36 Lap	12	71,325,750	12	750,000,000.00	12	1,000,000,000	36
61%	70%	415,345,000	75%	1,500,000,000	80%	1,500,000,000	2.25
100 Konflik	35	415,345,000	35	1,500,000,000	30	1,500,000,000	100
48 Lap	12	134,612,500	12	750,000,000	12	750,000,000	36

48 Lap	12	122,654,000	12	250,000,000	12	250,000,000	36
48 Lap	12	47,186,000	12	300,000,000	12	300,000,000	36
48 Lap	12	110,892,500	12	200,000,000	12	200,000,000	36
70%	70%	803,552,000	75%	1,300,000,000	80%	1,300,000,000	80
16 Lap	4	803,552,000	4	1,300,000,000	4	1,300,000,000	12
2600 Org	650	579,118,000	650	850,000,000	650	850,000,000	1950
20 Org	50	149,434,000	50	150,000,000	50	150,000,000	150

16 Lap	12	75,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	36
70%	70%	28,116,693,688	75%	2,400,000,000	80%	2,400,000,000	80
16 Keg	4	28,198,495,688	4	2,400,000,000	4	2,400,000,000	12
4 Dok	1	11,276,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	3
-	-	-	-	-	-	-	-
120 Org	30	26,850,903,688	30	1,200,000,000	30	1,200,000,000	90
24 Org	6	1,254,514,000	6	100,000,000	6	100,000,000	18

36 Lap	12	81,802,000	12	200,000,000	12	200,000,000	36
		35,802,978,590		18,241,868,541		21,155,195,395	

Penajam, Jar
Kepala Badan

Agus, S. Pd
Pembina TK. I (IV
NIP.19710815 20

Saldo Akhir Periode Renstra Angkat Daerah	Unit Kerja SKPD	Lokasi
	15,345,961,571	
Lap	9,920,302,070	
Org/Bln	9,199,342,070	Badan Kesbangpo
Dok	570,960,000	Badan Kesbangpo I
	150,000,000	
Bln	1,458,790,000	
Paket	40,540,000	Badan Kesbangpo I
Jenis	854,500,000	Badan Kesbangpo I
Paket	33,750,000	Badan Kesbangpo I
Lap	530,000,000	Badan Kesbangpo I
Bln	3,664,125,501	
Lap	101,000,001	Badan Kesbangpo
Lap	131,575,500	Badan Kesbangpo I
Lap	3,431,550,000	Badan Kesbangpo I
Bln	302,744,000	

Unit	232,244,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	
Unit	35,000,000	<i>Badan Kesbangpo</i>	
Unit	35,500,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	
%	12,997,112,517		
Keg	12,997,112,517		
Dok	-		
Dok	-		
Org	7,300,000,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
Org	2,875,786,767	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
Lap	2,821,325,750	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
%	7,039,575,750		

Lap	7,039,575,750		
Dok	-		
Dok	-		
Org	2,660,000,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
Org	2,558,250,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
Lap	1,821,325,750	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
%	3,415,345,000		
Konflik	3,415,345,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
Lap	1,634,612,500	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU

Lap	622,654,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
Lap	647,186,000		
Lap	510,892,500	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
%	3,403,552,000		
Lap	3,403,552,000		
Orang	2,279,118,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
Orang	449,434,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU

Lap	675,000,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
%	32,916,693,688		
Keg	32,998,495,688		
Dok	2,211,276,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
Dok	-		
Org	29,250,903,688	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>
Org	1,454,514,000	<i>Badan Kesbangpo I</i>	<i>4 Kec di Kab PPU</i>

Lap	481,802,000	Badan Kesbangpo I	4 Kec di Kab PPU
	75,200,042,526		

uari 2023

/b)

0312 1 004

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP: A	C	C	3,701,000,000	B	3,701,000,000	B	3,701,000,000	B	Huruf	11,103,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			a Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	Dok	15,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	21	Dok	15,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan	48 Laporan	12	2,719,500,000	12	2,719,500,000	12	2,719,500,000	36	Lap	8,158,500,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	18/14	2,619,500,000	18/14	2,619,500,000	18/14	2,619,500,000	54/42	Org/Bln	7,858,500,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Dok	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	36	Dok	300,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi	1 Laporan	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	Dok	15,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	Paket	15,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			d Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12	56,000,000	12	56,000,000	12	56,000,000	36	Bln	168,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	15	Paket	6,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	16 Paket	8	2,000,000	8	2,000,000	8	2,000,000	24	Jenis	6,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	Paket	3,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	Paket	3,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Arsip dan Penggandaan Dokumen	16 Paket	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	12	Paket	6,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Surat Kabar/ Majalah	72 Eks	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	Eks	3,000,000	Badan Kesbangpol	PPU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lap	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	Lap	3,000,000	Badan Kesbangpol	PPU			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi	
						2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52 Lap	13	46,000,000	13	46,000,000	13	46,000,000	39	Lap	138,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Unit Pengadaan BMD	4 Lap	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	3	Lap	4,500,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	0	1	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	1	Unit	4,500,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	12	840,000,000	12	840,000,000	12	840,000,000	36	Bln	2,520,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Administrasi Perkantoran	48 Lap	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36	Lap	45,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening Listrik Air dan Telepon	36 Laporan	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	36	Lap	75,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	36	Lap	2,400,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Kondisi Aset	12 Bulan	12	74,000,000	12	74,000,000	12	74,000,000	36	Bln	222,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional	52 Unit	13	70,000,000	13	70,000,000	13	70,000,000	39	Unit	210,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	10	2,000,000	10	2,000,000	10	2,000,000	30	Unit	6,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	4 Unit	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	Unit	6,000,000	Badan Kesbangpol	PPU	
Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan	Mengembangkan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan	Meningkatkatnya pemahaman dan pengetahuan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	70%	70%	2,500,000,000	75%	2,500,000,000	80%	2,500,000,000	80	%	7,500,000,000	Badan Kesbangpol		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi pedoman peningkatan bela negara	9 Keg	3	2,500,000,000	3	2,500,000,000	3	2,500,000,000	9	Keg	7,500,000,000	Badan Kesbangpol		
			Penyusun Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembaوران kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dok	-	Badan Kesbangpol	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, pembaوران kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dok	-	Badan Kesbangpol	


Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	1500 Org	300	500,000,000	300	1,750,000,000	300	1,750,000,000	900	Org	4,000,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	40 Org	10	350,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	30	Org	1,350,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	60 Lap	12	135,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	36	Lap	635,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pengangkatan Pumapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pumapaskibraka Duta Pancasila	0 orang	36	10,000,000	36	10,000,000	36	10,000,000	108	Lap	30,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	Dok	6,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	Dok	6,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	36	1,493,000,000	36	1,500,000,000,000	36	1,500,000,000,000	108	Orang	3,001,493,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Org	10	6,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000	30	Orang	18,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	Dok	6,000,000	Badan Kesbangpol	
			3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	0 Lap	1 Lap	450,000,000	75%	250,000,000	80%	250,000,000	80	%	950,000,000	Badan Kesbangpol	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Termonitoring Ormas di Kabupaten PPU	60 Lap	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	36	Lap	950,000,000	Badan Kesbangpol	
			Penyusun Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	200 Org	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	150	Org	450,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	40 Org	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	Org	150,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	36 Lap	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	36	Lap	150,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	61%	70%	250,000,000	75%	250,000,000	80%	250,000,000	2.25	%	750,000,000	Badan Kesbangpol	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan konflik	100 Kasus	35	150,000,000	35	150,000,000	30	150,000,000	100	Konflik	750,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Dok	1	80,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	Dok	280,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	25 Org	56	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	Org	150,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	30 Org	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	18	Org	150,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	48 Lap	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	36	Lap	150,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	0 Dokumen	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	Dok	90,000,000	Badan Kesbangpol	
			5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	70%	70%	100,000,000	75%	100,000,000	80%	100,000,000	80	%	300,000,000	Badan Kesbangpol	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terpantainya Kondisi Ekososbud di Kab. PPU	16 Lap	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	12	Lap	300,000,000	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	2600 Org	650	50,000,000	650	50,000,000	650	50,000,000	1950	Orang	150,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	20 Org	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	150	Orang	75,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	16 Lap	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	36	Lap	75,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien	6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	70%	70%	37,879,000,000	75%	1,000,000,000	80%	1,000,000,000	80	%	39,879,000,000	Badan Kesbangpol	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Tertib Administrasi Keuangan Partai	16 Keg	4	37,879,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	12	Keg	39,879,000,000	Badan Kesbangpol	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepalan daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang di susun.....	4 Dok	1	149,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	3	Dok	199,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepalan daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang di susun.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepalan daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.....	120 Org	30	35,229,000,000	30	900,000,000	30	900,000,000	90	Org	37,029,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepalan daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.....	24 Org	6	2,000,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	18	Org	2,100,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepalan daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.....	36 Lap	12	500,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	36	Lap	550,000,000	Badan Kesbangpol	4 Kec di Kab PPU
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Laporan	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	Lap	3,000,000	Badan Kesbangpol	
Total							44,580,000,000		7,701,000,000		7,701,000,000			60,482,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja SKPD	Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			



Agus, S. Pd
 NIP. 19710815 200312 1 004